

Nomor : B/ 949 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran**  
di  
Gedong Tataan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## **2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya sebagai berikut.

- a. Melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan kinerja baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah agar lebih berorientasi pada hasil/*outcome*, memiliki indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan memiliki keterpaduan dalam perencanaan kinerja (*integrated development plan*);
- b. Melakukan pendampingan dengan Kementerian PANRB terkait Perbaikan Penjenjangan Kinerja agar sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan dengan mengefisiensi sebanyak 28 Program dari 130 Program pada Tahun 2021 menjadi 102 program di Tahun 2022;
- d. Melakukan konsultasi dan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung terkait evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP Kabupaten Pesawaran;
- e. Membangun Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Pesawaran guna mempermudah pelaporan kinerja, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kinerja, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah;
- f. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaporan kinerja dengan menyajikan analisis capaian kinerja dan penyajian informasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kinerja;
- g. Membentuk Tim SAKIP Kabupaten Pesawaran dan rutin melakukan rapat koordinasi terkait perbaikan SAKIP Kabupaten Pesawaran.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran menunjukkan nilai sebesar **62,08** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi **AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,41
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,49
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,38
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,80
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,08</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2022 sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta dokumen lainnya sampai tingkat perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Selain itu, baik dari tingkat pemerintah kabupaten hingga seluruh perangkat daerah telah menyusun *cascading* kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang di antaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan cukup. Sebagai contoh pada indikator “angka harapan lama sekolah” menjadi alat ukur dari sasaran “meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat” pada dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Pesawaran Tahun 2022;
- Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja terbaru Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang belum diunggah pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Contoh dokumen tersebut adalah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026, yang diunggah hanya dokumen matriks saja yang tidak menyajikan secara keseluruhan Rencana Strategis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026;
- Pemanfaatan hasil capaian kinerja tahun lalu sebagai dasar dalam penyusunan target kinerja tahun berikutnya belum merata di seluruh perangkat daerah;
- Pohon kinerja (*logical framework*) telah disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang *cascading* kinerja, namun masih diterapkan di beberapa perangkat daerah utama saja, belum diterapkan di seluruh perangkat daerah.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan perangkat daerah telah mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pengukuran kinerja yang diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat dokumen indikator kinerja utama yang belum menampilkan definisi operasional pada setiap indikator kinerjanya sehingga belum dapat diketahui secara pasti substansi dan kesesuaian rumus perhitungannya;
- Aplikasi *monitoring* dan evaluasi kinerja sudah dipakai untuk memantau capaian kinerja, namun masih perlu didorong pengisian aplikasi kinerja agar data informasi kinerja selalu *update*;
- Hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penyesuaian strategi kinerja ke depan dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan, telah dibandingkan dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya, telah dibandingkan dengan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Strategis perangkat daerah, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Lampung maupun secara nasional;
- Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah telah dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan ke depan untuk perbaikan perencanaan dan penetapan target ke depan namun belum merata ke seluruh perangkat daerah.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada sebagian besar perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hal ini terlihat dari laporan hasil evaluasi internal yang di upload ke [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang di antaranya sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan belum detail terhadap temuan-temuan yang ingin disampaikan. Catatan dan rekomendasi masih bersifat umum dan belum mendetail tepat ke sasaran;
- *Monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum dilakukan oleh inspektorat.

## 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melengkapi dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) sebagai bentuk komitmen dalam penerapan SAKIP;

- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun PD untuk memastikan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan tingkatannya di seluruh perangkat daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Menampilkan definisi operasional pada dokumen indikator kinerja utama yang pada setiap indikator kinerjanya sehingga dapat diketahui secara pasti substansi dan kesesuaian rumus perhitungannya;
- 5) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *monitoring* dan evaluasi kinerja Kabupaten Pesawaran dengan melakukan *update* data kinerja secara berkala dalam aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- 7) Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Lampung maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi yang mana saja;
- 8) Memastikan bahwa laporan kinerja yang telah disusun agar dimanfaatkan untuk penetapan target mendatang dan sebagai bahan reviu dokumen perencanaan jangka menengah;
- 9) Memperjelas dan memperinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP setiap perangkat daerah, sehingga dapat diketahui dengan pasti bagian mana saja pada setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, perlu dirumuskan mekanisme *monitoring* yang efektif untuk memastikan setiap PD menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan;
- 10) Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Bupati Pesawaran.